

Collaborative Governance Program Gerakan Desa Ikut Sejahtera (GaDIS) Kabupaten Pesawaran

Umi Fitriana Lestari¹, Wendi Aji Saputra²

^{1,2} Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Musi Rawas

Jl. Letkol Sukirno, Air Kuti, Kec. Lubuk Linggau Tim. I, Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan, Indonesia

Korespondensi Penulis: umifitrianalestari@gmail.com

Informasi:

Article History;

Received:

20/10/2023

Revised:

02/11/2023

Accepted:

23/12/2023

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi keberhasilan desa sejahtera dengan menganalisis *collaborative governance* dalam program Gerakan Desa Ikut Sejahtera (GaDIS), di Kabupaten Pesawaran. Kabupaten Pesawaran menjadi salah satu Kabupaten di Provinsi Lampung protipe pelaksanaan program desa Sejahtera dengan beberapa aktifitas berupa sekolah ibu-ibu produktif, bank sampah, dan pengembangan wisata pantai yang terus berjalan hingga saat ini. Keberhasilan Kabupaten Pesawaran dalam melaksanakan pemberdayaan tidak terlepas dari dukungan berbagai aktor diantaranya pemerintah daerah, pemerintah desa, kelompok masyarakat, serta berbagai pihak swasta yang turut serta mensukseskan program desa sejahtera. Metode penelitian ini yaitu kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Informan dipilih secara purposive dengan melibatkan berbagai stakeholders yang memahami permasalahan yang diteliti. pengumpulan data dilakukan melalui FGD, wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Analisa data dilakukan secara interaktif yakni pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan menggunakan 10 dimensi collaborative governance. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program Gerakan Desa Sejahtera (GaDIS) melalui berbagai diskusi dengan berbagai pihak yang saling percaya satu sama lain. Kepercayaan diantara pihak tersebut dituangkan ke dalam komitmen berupa kontrak kerjasama dan surat rekomendasi yang disepakati secara bersama. Adapun struktur jaringan di Kabupaten Pesawaran terkategori sebagai self governance, yakni setiap pihak berpartisipasi dalam menjalankan tupoksinya masing-masing. Setiap pihak memiliki kewenangan masing-masing untuk menjalankan tugasnya dan mengakses (hak) berbagai kebutuhan dalam rangka mensukseskan program GaDIS.

Keyword: *Collaborative Governance, Program GaDIS*

PENDAHULUAN

Hakekat pelaksanaan otonomi daerah adalah memberikan kesempatan bagi daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya dalam kerangka hukum yang berlaku oleh karena itu daerah dituntut untuk melakukan inovasi-inovasi dalam pembangunan daerah. Pemerintah pusat mengadakan "Innovative Government Awards (IGA)" sebagai support eksternal agar pemerintah daerah selalu berinovasi untuk memajukan dan mensejahterakan masyarakatnya dan menambah daya saing bagi daerah tersebut. Kabupaten Pesawaran merupakan salah satu daerah otonom baru di Propinsi Lampung mempunyai inovasi dalam pembangunan daerah berdasarkan Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pesawaran Nomor 49 Tahun 2017 yang dinamakan program Desa Maju Andan Jejama Gerakan Desa Ikut

Sejahtera (GaDIS). GaDIS merupakan program pemberian bantuan keuangan untuk mewujudkan desa tangguh dan mandiri dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat pedesaan dengan mengangkat potensi lokal yang ada di desa menjadi ekonomi kreatif dan inovasi desa demi kemajuan desa dan terciptanya lapangan kerja melalui peningkatan badan usaha milik desa (BUMDes), bagi desa yang mampu mengelola BUMDes-nya dengan baik, Pemerintah Kabupaten Pesawaran akan memberikan penghargaan “BUMDes Award”. Hal ini sebagai upaya memberikan penghargaan bagi desa yang secara kepatutan telah menjadi desa yang baik dalam merealisasikan pajak bumi dan bangunan yang akan direalisasikan berupa bantuan stimulus keuangan ke BUMDes.

Beberapa kriteria yang harus dipenuhi oleh desa untuk mendapatkan program GaDIS, diantaranya: tertib administrasi desa, lunas PBB, berjalannya Siskamling, inovasi PKK, dan yang paling utama ialah adanya dokumen perencanaan usaha BUMDes. Sebagai program yang ditekankan untuk penguatan BUMDes, bantuan dana GaDIS yang berjumlah Rp100 juta untuk setiap Desa tersebut merupakan komponen pembiayaan dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Program Gerakan Desa Ikut Sejahtera (GaDIS) merupakan satu-satunya inovasi kebijakan yang berupa bantuan keuangan yang ada di Provinsi Lampung yang ditujukan untuk memperkuat sekaligus memberi ruang gerak inisiatif BUMDes, sebab biasanya program-program yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi atau Kabupaten/Kota di Lampung hanya berfokus pada bantuan peningkatan infrastruktur saja sehingga inovasi kebijakan ini seharusnya dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan dan nilai kemanfaatannya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat desa di Kabupaten Pesawaran.

Keberhasilan Program Gerakan Desa Ikut Sejahtera (GaDIS) di Kabupaten Pesawaran tersebut tidak lepas dari sinergitas *stakeholder* yang telah memfasilitasi dan mendukung program tersebut. Pola kerja ini sejalan dengan teori *collaborative governance* terkait dengan proses pencapaian tujuan bersama dengan melibatkan aneka *stakeholders* dimana mereka mengusung kepentingan masing-masing pihak (Hartman, Hofman, Stafford & Bruijin., 2002), sehingga mampu mewujudkan percepatan pembangunan baik dalam pembangunan infrasturktur maupun sumber daya manusianya yang dapat merasakan hasil dari program ini khususnya masyarakat desa. Berdasarkan uraian diatas maka perlu dilakukan kajian lebih lanjut untuk melihat *collaborative governance* dalam Program Gerakan Desa Ikut Sejahtera (GaDIS) di Kabupaten Pesawaran pada waktu mendatang dapat direplikasikan pada daerah-daerah lain, dari latar belakang yang sudah diuraikan, penulis bertujuan untuk meneliti mengenai *Collaborative Governance* Program Gerakan Desa Ikut Sejahtera (GaDIS) di Kabupaten Pesawaran.

TINJAUAN TEORITIS

Collaborative governance atau kolaborasi penyelenggaraan pemerintahan muncul sebagai respon atas kegagalan implementasi dan tingginya biaya dan adanya politisasi terhadap regulasi (Ansell & Gash, 2007). Sejalan dengan hal tersebut, Fadlurrahman, Mukti, Kurniasih, & Winanta (2022) menyatakan bahwa pemerintah perlu bekerja sama dengan berbagai pihak termasuk masyarakat itu sendiri khususnya yang memiliki kesamaan kepentingan pada isu yang sedang berlangsung. Bahkan melibatkan masyarakat pada

program yang sedang diimplementasikan pemerintah merupakan poin utama dalam *collaborative governance practice* (Kariem & Afrijal, 2021)

Konsep *collaborative governance* hadir karena adanya hubungan yang saling ketergantungan antar pihak. *Collaborative governance* memiliki proses panjang untuk menciptakan hasil yang memuaskan. Ansell dan Gash (2007) menyatakan lima aspek dalam *proses collaborative governance*, yaitu *face to face dialogue*, *trust building*, *commitment to process*, *share understanding*, hingga *intermediate outcomes*. Proses tersebut merupakan tahapan yang dilalui oleh para *stakeholders* yang berkomitmen secara formal untuk melakukan kolaborasi. Kemudian Moore (2009) memberikan delapan variabel untuk menilai *collaborative governance*, diantaranya struktur jaringan, komitmen terhadap tujuan, kepercayaan, tata kelola, akses terhadap keotoritasan, distribusi akuntabilitas/tanggung jawab, berbagi informasi, dan akses terhadap sumber daya. Baik menurut Ansell dan Gash (2007) maupun Moore (2009) memiliki kemiripan dan dapat dijadikan sebagai dimensi dalam menganalisis *collaborative governance*, sehingga akan kami sintesis sebagai dimensi yang digunakan dalam penelitian ini.

Tabel 1. Dimensi Collaborasi Governance

| Dimensi | Makna |
|---|--|
| Face to face dialogue | Dialog secara tatap muka untuk membuat kesepakatan bersama |
| <i>Trust building/</i> Kepercayaan | Upaya membangun kepercayaan antar <i>stakeholders</i> yang dilakukan pada tahap awal. |
| Komitmen pada tujuan | Suatu bentuk tindakan dan sikap untuk melakukan sesuatu secara bersama. Komitmen juga menunjukkan bentuk tanggung jawab masing-masing <i>stakeholders</i> |
| <i>Share understanding</i> | Berbagi pemahaman mengenai apa yang dicapai melalui <i>collaborative governance</i> . Dapat berupa misi bersama, tujuan bersama, objektivitas umum, ideologi bersama, dan lain-lain. |
| <i>Intermediate outcomes</i> | Output yang nyata melalui <i>collaborative governance</i> yang memberikan keuntungan bersama bagi setiap <i>stakeholders</i> . |
| Struktur jaringan | Berupa struktur kolaborasi yang tidak boleh mencerminkan adanya hierarki. Semua <i>stakeholders</i> memiliki posisi yang sama: hak, kewajiban, tanggung jawab, otoritas, dan sebagainya. |
| Tata kelola | Dimensi ini akan menganalisis kejelasan <i>collaborative governance</i> dari sisi hubungan antar aktor, aturan yg disepakati, serta proses kolaborasi seperti apa. |
| Akses terhadap keotoritasan | Berkaitan dengan ketersediaan ukuran atau ketentuan prosedur yang jelas dan diterima secara luas. |
| Akses terhadap sumber daya | Berkaitan dengan ketersediaan sumber daya yang dapat diakses oleh setiap <i>stakeholders</i> . |
| Distribusi akuntabilitas/ tanggungjawab | Berkaitan dengan pembagian tanggung jawab dalam segala proses <i>collaborative governance</i> |

Sumber: Ansell dan Gash (2007) maupun Moore (2009)

Kajian *collaborative governance* telah banyak dilakukan oleh beberapa akademisi dan menjadi rujukan dalam penelitian ini. Beberapa berfokus pada proses pemerintahan (Irawan, 2017), pembangunan pedesaan (Febrian, 2016), penguatan lembaga (Kurniasih, Styoko, dan Imron, 2017), peningkatan keterampilan wirausaha (Fitriani, Marsuq, dan Suhardiman, 2019), serta pembangunan dan pengembangan pariwisata (Yasintha, 2020; Fadlurrahman, dkk., 2022). Namun demikian, fokus penelitian-penelitian tersebut berada pada ranah yang berbeda dengan penelitian ini. Penelitian ini dilakukan dengan berfokus pada analisis *collaborative governance* pada program pemerintah terhadap kesejahteraan desa dengan mensintesis dimensi *collaborative governance* itu sendiri. Artinya *state of the art* penelitian ini terletak pada penggunaan konsep/teori yang disintesis.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi kasus yang menggambarkan mengenai kebijakan pemerintah daerah dalam merancang dan melaksanakan kebijakan (Sugiono, 2018). Penelitian dengan pendekatan studi kasus untuk mencari informasi/data secara detil permasalahan nyata dalam masyarakat. Peneliti secara obyektif mengumpulkan data primer melalui wawancara, diskusi dan observasi. Data sekunder dikumpulkan melalui studi pustaka: dokumen, jurnal dan buku. Data yang terkumpul kemudian dipilah-pilah untuk menjawab rumusan masalah baik dari dalam pelaksana Program GaDis maupun di luar Program GaDis yang ada di Kabupaten Pesawaran. Kemudian data primer dan sekunder di analisis. Setelah data analisis, kemudian penulis menganalisis (mengeksplorasi) data yang dihasilkan dalam bentuk penjelasan atau uraian kalimat yang disusun secara sistematis. Kemudian ditarik suatu kesimpulan secara khusus yang merupakan jawaban permasalahan berdasarkan hasil penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Face to face dialogue

Semua tata kelola kolaboratif didasarkan pada dialog para aktor. Sebagai proses yang berorientasi pada konsesus, dengan ini dapat memberikan kesempatan kepada setiap aktor untuk mengidentifikasi peluang menguntungkan. Dialog yang dimaksud juga digunakan untuk mengurangi ketidakpercayaan antar aktor ketika menjalin kerjasama dan mencegah pencarian keuntungan bersama pada tahap awal kerjasama, hal ini karena pada tahap awal penekanannya adalah pada membangun konsensus dari pada mengelola kepentingan masing-masing aktor. Dalam pengimplementasian Program Gerakan Desa Ikut Sejahtera (GaDIS) di Kabupaten Pesawaran, para anggota masyarakat, pengurus, dan *stakeholder* yang terlibat melakukan dialog dan interaksi secara tatap muka untuk membuat keputusan-keputusan/kesepakatan bersama demi berkembangnya desa berdaya. Dimana dialog secara tatap muka tersebut dilakukan secara musyawarah mufakat bersama.

Pelaksanaan interaksi secara tatap muka melalui musyawarah mufakat ini ditujukan agar terjalin proses pembangunan kepercayaan, saling menghormati, saling pengertian yang timbul didiri setiap aktor yang terlibat. Selain itu, dalam pelaksanaan rencana kerja program Gerakan Desa Ikut Sejahtera (GaDIS) secara rutin setiap 3 bulan sekali dalam melaksanakan pertemuan dengan *stakeholder*. Pertemuan ini dilaksanakan untuk membahas persiapan dan

segala instrument yang diperlukan dalam pengelolaan program tersebut. Dalam pertemuan tersebut bersifat privat dan tertutup dengan pembahasan mengenai apa saja program yang bisa dijalankan dan besaran kontribusi yang bisa diberikan dan dilakukan oleh pihak pemerintah, swasta, dan masyarakat.

Trust Building

Pembangunan kepercayaan antar pemangku kepentingan merupakan titik awal dari setiap proses kolaborasi. Proses kolaborasi tidak hanya berfokus pada interaksi pribadi, namun juga membangun kepercayaan antar aktor. *Trust building* atau membangun kepercayaan merupakan fase yang digunakan untuk membentuk proses saling pengertian antara pihak-pihak yang terlibat dan berkomitmen dalam proses kolaborasi. Kepercayaan seluruh aktor termasuk masyarakat, pengurus, dan pihak lain dalam berkolaborasi mengelola program desa berdaya dikarenakan adanya interaksi profesionalitas sosial, sehingga timbul rasa saling percaya untuk mengupayakan berbagai kegiatan bersama *stakeholder* lainnya yang masih dalam satu jaringan untuk mencapai *goal* yang telah ditetapkan secara bersama.

Aspek kepercayaan ini telah diupayakan dibangun dengan beberapa cara, diantaranya memprioritaskan waktu berkualitas, bertanggung jawab, berkomunikasi, berusaha untuk dapat dipercaya, adanya keterbukaan antar anggota, melakukan pendekatan dan sosialisasi, bekerja dengan baik, sportif dan didukung administrasi secara rutin, saling menghormati pendapat satu sama lain, saling berkomunikasi dan sering mengadakan pertemuan, rasa saling terkait dan mengkomunikasikan, keterbukaan dalam semua hal, saling percaya terbuka, dan selalu terdepan memberi contoh dalam melaksanakan program, membuat program yang nyata dan dikerjakan dengan sportif, serta selalu menjaga moral.

Dasar terciptanya rasa saling percaya dan rasa saling percaya itu penting dilakukan dikarenakan sudah kenal dengan sifat personalnya, keinginan untuk maju bersama, semua bekerja sesuai dengan rencana saling percaya dengan sesama itu penting agar dalam berorganisasi bisa nyaman, terbuka tentang semua hal kegiatan dan pembukuan, tidak saling menyalahkan agar tetap bersatu, terbuka tentang semua hal kegiatan dan pembukuan, pengurus selalu terbuka dan tidak menyalahkan salah satu atau lainnya, selalu jujur dan ikhlas sesama pengurus dan anggota, jujur dan disiplin untuk tercapainya program yang nyata, rasa kebersamaan untuk mencapai tujuan besar bersama. Rasa percaya ini penting sekali harus terjaga agar membuat kelancaran semua kegiatan dan semua hal. Selain itu, terbukti bahwa dengan adanya rasa saling percaya di antara warga sangat mempengaruhi perkembangan program dan kegiatan desa di Kabupaten Pesawaran.

Commitment to process

Komitmen atau keterlibatan terhadap proses cenderung sangat bervariasi, hal ini dikarenakan melalui keterlibatan akan mampu menunjukkan proses kolaborasi yang merupakan variabel utama untuk menggambarkan keberhasilan atau kegagalan program. Komitmen (keterlibatan) berjalan seiring dengan insentif yang kuat untuk terlibat dalam tata kelola bersama. Komitmen terhadap proses berarti menumbuhkan keyakinan bahwa negosiasi yang jujur dan timbal balik merupakan *the best way* dalam rangka merealisasikan tujuan

program yang diinginkan, hal ini menunjukkan bahwasanya rasa saling percaya merupakan kunci dari kolaborasi.

Perwujudan komitmen program GaDIS yakni mengenai suatu bentuk tindakan dan sikap untuk melakukan sesuatu secara bersama. Komitmen setiap aktor merujuk kepada kontrak kerjasama serta surat rekomendasi yang telah disepakati, hal tersebut ditunjukkan juga menggambarkan bentuk tanggung jawab masing-masing *stakeholders*. Komitmen yang dibangun dalam pelaksanaan program tersebut ditujukan untuk menunjukkan betapa bersih, adil, dan transparannya proses kolaborasi. Komitmen yang dibangun oleh aktor dan pemangku kepentingan yang aktif bergantung pada kepercayaan aktor lain untuk menghormati perspektif dan kepentingan mereka. Kepemilikan dan komitmen dapat memperkuat keterlibatan diantara para pemangku kepentingan. Rasa memiliki proses kolaborasi akan mempengaruhi munculnya rasa saling memiliki terhadap proses. Kepercayaan berkontribusi pada fakta bahwa seluruh aktor yang terlibat di program tersebut sangat bertanggung jawab dalam menjalankan tugas masing-masing.

Share understanding

Berbagi pemahaman mengenai keingin yang akan dicapai melalui *collaborative governance* berupa misi bersama, tujuan bersama, objektivitas umum, dan ideologi bersama. Dari pemahaman ini terimplementasi tujuan utama atau rencana-rencana besar dari program GaDIS, diantaranya menuju masyarakat yang sejahtera, mendapatkan masukan/tambahan dana untuk pengelolaan kegiatan, memajukan masyarakat desa di wilayah Kabupaten Pesawaran untuk lebih maju lagi, merubah menjadi baik lagi, meningkatkan taraf hidup ekonomi keluarga, menuju masyarakat yang berdaya dan berhasil, Desa Wisata, menyejahterakan masyarakat, menjadi warga yang makmur atau tidak ada kurang masalah ekonomi, menuju desa mandiri, meningkatkan kualitas ekonomi masyarakat, pengembangan ekonomi terkait legaisasi produk, sertifikasi halal, pengembangan/pelatihan produk jajanan pasar, riset pakan ternak dari limbah kulit singkong atau jagung.

Selain itu, terdapat juga rencana-rencana besar yang ingin diraih secara bersama, baik masyarakat, pengurus, dan *stakeholder*. Diantaranya, masyarakat yang adil dan makmur, masyarakat mencapai kesejahteraannya, menjadikan masyarakat yang sukses dan mandiri, masyarakat yang adil, makmur, dan berpendidikan, menambah pendapatan desa, meningkatkan perekonomian warga desa Kabupaten Pesawaran, menjadikan Desa Wisata, Riset pengelola sangat dinamis, teguhnya desa wisata, masyarakat yang sejahtera.

Intermediate outcomes

Bentuk nyata dari adanya kolaborasi yakni terdapat kemungkinan mencapai kesuksesan dalam berkolaborasi. Pada program desa berdaya ini, terdapat beberapa program dan kegiatan yang ada dan sudah terlaksana. Program dan kegiatan tersebut diantaranya, Bank sampah, PKK desa, Kelompok Wanita Tani (KWT), PAMSIMAS, Kegiatan wisata air dan kuliner, panahan, ternak kambing, Kelompok ternak, Kelompok tani, PLTHH, RPP, Desa wisata, BUMDES, PLTMTL, Gapoktan, Mikro hidro

Struktur jaringan

Struktur jaringan dapat dideskripsikan sebagai suatu keterkaitan antar setiap aktor/elemen yang bersatu secara bersama dimana hal tersebut menggambarkan berbagai unsur fisik dari suatu jaringan yang dikelola. Keunikan dari pengelolaan program GaDIS di Kabupaten Pesawaran yakni berupa *self governance*, yaitu tata kelola yang tidak memiliki satuan administratif yang formal, namun setiap pihak saling bahu membahu (berpartisipasi aktif) dalam menjalankan tupoksinya di dalam jaringan tersebut. Hasil *Focus Grup Discussion* (FGD), observasi, dan wawancara menunjukkan bahwa unit-unit yang terlibat dalam pelaksanaan *collaborative governance* meliputi pemerintah daerah, pemerintah desa, pengurus, anggota, masyarakat, dan *stakeholder* yang terlibat dalam program GaDIS jelas perannya masing-masing.

Tata kelola

Hubungan kepercayaan antar aktor sangat perlu untuk dibangun, hal ini dikarenakan dengan landasan adanya aturan yang disepakati bersama dari setiap pemangku kepentingan, serta ada kebebasan yang menentukan bagaimana kolaborasi dijalankan. Pengimplementasian tata kelola dalam Program GaDIS diterapkan melalui pengungkapan kejelasan antara siapa yang menjadi pengurus dan siapa yang menjadi anggota. Dukungan untuk interaksi dan komunikasi merupakan hal penting yang harus dilakukan oleh tiap-tiap pihak dalam mengusahakan tujuan bersama desa yang sejahtera. Dalam hal ini interaksi dan komunikasi dengan *stakeholder* adalah dilakukan dengan secara formal dan informal. Secara formal biasanya dengan diadakannya pelatihan atau pertemuan-pertemuan, tetapi pertemuan-pertemuan juga kadang dilakukan secara informal.

Akses terhadap keotoritasan

Dalam pelaksanaan program GaDIS di Kabupaten Pesawaran dapat diketahui bahwa seluruh *stakeholders* diberikan kewenangan untuk mengimplementasikan keputusan-keputusan bersama. Masing-masing *stakeholder* memiliki tanggung jawab dan wewenang sesuai dengan peran masing-masing, Universitas Lampung sebagai pihak eksternal bertindak dan berwenang untuk memberikan pendampingan dan penguatan kapasitas kelembagaan dan kemampuan teknis. Pemerintah daerah sebagai regulator berwenang mengatur pemanfaatan seluruh program dengan cara membagi dan menentukan tugas dan peran seluruh *stakeholders*. Sementara masyarakat berwenang untuk memberikan dukungan dalam bentuk pikiran, waktu, dan biaya. Masyarakat juga dapat melakukan koreksi apabila terdapat ketidaksesuaian atau penyimpangan dalam pelaksanaan dan pengelolaan program GaDIS.

Akses terhadap sumber daya / berbagi informasi

Pengelolaan akses terhadap informasi-informasi yang ada, terdapat *sharing* informasi yang dilakukan antar anggota masyarakat, pengurus, dan *stakeholder* guna mewujudkan tujuan bersama yang direncanakan. Dimana *sharing* informasi tersebut dilakukan dengan cara saling mengutarakan kelebihan dan kekurangan, mengadakan pertemuan rutin, mengadakan pertemuan lewat media informasi, melalui *zoom*, dan menyampaikan pendapat secara langsung. Selain aspek berbagi informasi dalam pengelolaan desa berdaya, terdapat aspek

terhadap sumber daya. Dimana dalam hal ini, terdapat beberapa sumber daya dan sarana prasarana yang dimiliki oleh kepengurusan program GaDIS, diantaranya alat/fasilitas pendukung, sekretariat, buku catatan, program ekonomi. Dalam pengelolaan sumber daya dan sarana prasarana yang ada, seluruh pengurus dan pihak eksternal diperbolehkan untuk menggunakan sumber daya dan sarana prasarana tersebut untuk digunakan demi mewujudkan kepentingan bersama.

Distribusi akuntabilitas / tanggung jawab

Pada pelaksanaan desa berdaya dalam segala proses *collaborative governance* terdapat adanya pembagian tugas/peran untuk mewujudkan tujuan bersama yang telah direncanakan. Dimana pembagian tugas/peran ini penting adanya dilakukan agar masing-masing pihak yang berperan dapat menjalankan tugasnya sesuai apa yang telah diberikan tanpa adanya tabrakan peran dengan pihak lain. Pembagian tugas/peran tersebut dilaksanakan dengan membagi tugas sesuai dengan peran orang tersebut, bergantian di jadwal, bekerjasama dalam menjalankan tugas, membagi tugas diatur menurut jabatan dan kewenangan dan kesepakatan bersama, dibuat stuktur organisasi dengan tugas masing-masing, menyesuaikan pada kemampuan masing-masing, dan lainnya.

KESIMPULAN

Program Gerakan Desa Ikut Sejahtera (GaDIS) Kabupaten Pesawaran dimulai dengan para aktor yakni anggota masyarakat, pengurus, dan *stakeholder* yang terlibat melakukan pertemuan untuk berdialog dan berinteraksi secara tatap muka seperti untuk membuat keputusan-keputusan/kesepakatan bersama demi berkembangnya desa yang sejahtera. Kepercayaan seluruh aktor dalam berkolaborasi didasarkan pada hubungan profesionalitas dan/atau sosial, selain itu komitmen masing-masing aktor mengacu pada kontrak kerjasama dan surat rekomendasi yang telah disepakati bersama, hal tersebut ditunjukkan juga menggambarkan bentuk tanggung jawab masing-masing *stakeholders*. Pelaksanaan program ini terimplementasi dari adanya tujuan/rencana, meskipun dalam pelaksanaannya belum semua tujuan/rencana tercapai. Pada program desa berdaya ini, terdapat beberapa program dan kegiatan yang ada dan sudah terlaksana. Keberadaan struktur jaringan pada pengelolaan program GaDIS dapat dikategorikan dalam bentuk *self governance*. Pengelolaan akses terhadap informasi-informasi yang ada, terdapat *sharing* informasi yang dilakukan antar anggota masyarakat, pengurus, dan *stakeholders* juga terdapat beberapa sumber daya dan sarana prasarana yang dimiliki oleh kepengurusan program GaDIS. Pada pelaksanaan Gerakan Desa Ikut Sejahtera (GaDIS) dalam segala proses *collaborative governance* terdapat adanya pembagian tugas/peran untuk mewujudkan tujuan bersama yang telah direncanakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ansell, C., dan Gash, A. 2007. Collaborative Governance in Theory and Practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*. Vol. 18(4): 543-571.
- Creswell, J. W. 2014. *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset*, Edisi Indonesia (cetakan I). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Sugiyono. 2014, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. ALFABETA: Bandung
- Suharto, Edi. 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Bandung: Refika Aditama.
- Fadlurrahman, Mukti, A., Kurniasih, Y., & Winanta, R. A. 2022. Collaborative Governance Dalam Pengelolaan dan Pengembangan Pariwisata di Desa Ngargogondo Kecamatan Borobudur. *Jurnal Pemerintahan dan Politik*. Vol. 7(2): 29-35.
- Fatimah, Siti. 2020. *Peran Rumah Zakat Dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Desa Berdaya (Studi Kasus di Desa Sukadalem, Kecamatan Waringin Kurung, Kabupaten Serang)*. Skripsi. UIN Sultan Maulana Hasanuddin.
- Febrian R. A. 2016. Collaborative Governance Dalam Pembangunan kawasan Perdesaan (Tinjauan Konsep Dan Regulasi). *WEDANA: Jurnal Pemerintahan, Politik dan Birokrasi*. Vol. 2(1): 200-208.
- Fitriani, Marsuq, & Suhardiman. 2019. Collaborative Governance Dalam Meningkatkan Keterampilan Kewirausahaan Masyarakat di Desa Muara Pantun Kabupaten Kutai Timur. *Administrasi Publik*. Vol. 1(1): 584-602.
- Irawan D. 2017. Collaborative Governance (Studi Deskriptif Proses Pemerintahan Kolaboratif Dalam Pengendalian Pencemaran Udaradi Kota Surabaya). *Kebijakan dan Manajemen Publik*. Vol. 5(3): 1-12.
- Kariem, M. Q., & Afrijal. 2021. Collaborative Governance pada Revitalisasi Sungai Sekanak di Kota Palembang. *Jurnal Pemerintahan dan Politik*, 6(3): 107-114.
- Kurniasih, D., Setyoko, P. I., & Imron M. 2017. Collaborative Governance Dalam Penguatan Kelembagaan Program Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM) di Kabupaten Banyumas. *Sosiohumaniora*. Vol. 19(1): 1-7.
- Yasintha, P. N. 2020. Collaborative Governance Dalam Kebijakan Pembangunan Pariwisata di Kabupaten Gianyar. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*. Vol. 4(1): 1-23.